

**PORTOFOLIO**  
**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

(Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir Kelompok dengan Menganalisis 3 artikel, 3 jurnal Nasional, 2 jurnal Internasional, serta 1 laporan keuangan Akuntansi Sektor Publik)

**Dosen Pengampu :**

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia S.E., M.Si., M.S.AK. AK. C.A
3. Fiarika Dwi Utari S.Pd., M.Pd



**Disusun Oleh Kelompok 3 :**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Anggi Fadhillah Putri | 2313031061 |
| 2. Ranum Sri Rahayu      | 2313031074 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**  
**JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## ANALISIS ARTIKEL

---

### ARTIKEL 1

#### A. IDENTITAS ARTIKEL

1. Judul Artikel : Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua  
Dalam Pelaporan Keuangan Sektor Publik  
(Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih 2022).
2. Nama Penulis : Mike Fernisia, Sony Fransisco Siboro, Paulina  
Putri Ningrum, dan Salsabila Dwiyantri
3. Tahun Terbit Artikel : 2024
4. Tanggal di Akses : 24 November 2025

#### B. DESKRIPSI ARTIKEL

##### 1. Pendahuluan

Sektor publik sebagai penyedia layanan masyarakat yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik berbasis akrual, yang mencatat transaksi saat terjadi, dianggap lebih unggul daripada basis kas karena memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Regulasi seperti PP No. 71 Tahun 2010 mendorong penggunaan basis akrual di sektor publik, termasuk pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Studi menunjukkan bahwa basis akrual meningkatkan kualitas laporan keuangan, kepercayaan publik, dan pengawasan internal. Penelitian ini bertujuan menggali lebih jauh manfaat basis akrual bagi pelaporan sektor publik.

##### 2. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di sektor publik, termasuk Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Berdasarkan studi sebelumnya, seperti Suryaningsih & Hidayat (2020), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terbukti meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010. Satrio & Wijayanti (2020) menegaskan bahwa sistem berbasis akrual menghasilkan informasi keuangan yang signifikan, sehingga meningkatkan kinerja sektor publik. Sari & Wahyuni (2022) juga

menemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara berdampak positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penerapan basis akrual pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih menghasilkan beberapa manfaat utama:

- a) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Sistem ini mencatat pendapatan dan biaya secara langsung saat terjadi, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan donatur, pemerintah, serta masyarakat. Hal ini tercermin dalam peningkatan donasi tahun 2022 dibandingkan 2021.
- b) **Efisiensi:** Pencatatan real-time dan penggunaan perangkat lunak akuntansi berbasis akrual mempercepat proses pelaporan dan mengurangi beban kerja manual.
- c) **Pengawasan:** Dokumentasi yang tepat waktu memudahkan deteksi dini kesalahan atau kecurangan, memperkuat pengawasan internal.

### **C. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pelaporan sektor publik, khususnya pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih di tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual memberikan kontribusi positif terhadap kinerja yayasan maupun organisasi sektor publik lainnya, terutama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem ini berhasil meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dari donatur dan masyarakat. Selain itu, pencatatan berbasis akrual yang dilakukan secara real-time serta dukungan perangkat lunak akuntansi membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan, mengurangi pekerjaan manual, dan meminimalkan penundaan. Hal ini juga meningkatkan efektivitas pengawasan internal, memungkinkan deteksi dini atas kesalahan atau potensi kecurangan.

## AERTIKEL 2

### A. IDENTITAS ARTIKEL

1. Judul Artikel : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik
2. Nama Penulis : Loso Judijanto, Eko Sudarmanto, dan Andri Triyantoro
3. Tahun Terbit Artikel : 2024
4. Tanggal Di Akses : 24 November 2025

### B. DESKRIPSI ARTIKEL

#### 1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan sektor publik penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Transparansi memastikan informasi keuangan yang akurat, sementara akuntabilitas menuntut tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya (Yuniar et al., 2023; Adil, 2022). Upaya ini mendorong reformasi akuntansi yang menyerupai sektor swasta, meski implementasinya masih beragam dan menghadapi tantangan kompleksitas (Maqdllyan, 2022). Analisis bibliometrik membantu memetakan tren, kesenjangan, dan pengaruh penelitian di bidang ini, memberikan panduan untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, masih diperlukan kajian komprehensif untuk memahami dampak praktik ini terhadap tata kelola dan kepercayaan publik secara global.

#### 2. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Evolusi Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik telah berkembang pesat. Awalnya berfokus pada kepatuhan dan pengendalian anggaran, kini bergeser menuju pelaporan yang lebih transparan akibat tuntutan publik yang semakin tinggi (Gaspar et al., 2022; Adil, 2022). Adopsi standar internasional seperti IPSAS dan GAAP di banyak negara telah meningkatkan kualitas dan keterbandingan informasi keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Natisation et al., 2022; Castañeda-Rodríguez, 2022).

##### 2. Tantangan Implementasi

Penerapan standar pelaporan ini menghadapi hambatan, seperti perbedaan politik, kapasitas ekonomi, dan infrastruktur administratif di

berbagai negara (Kelly et al., 2023). Di negara berkembang, tantangan seperti kekurangan tenaga ahli, teknologi yang kurang memadai, dan resistensi politik menjadi penghalang utama (Pylypko et al., 2022; Robinson, 2022). Selain itu, penyesuaian operasional dan budaya organisasi juga memerlukan upaya signifikan untuk implementasi yang efektif.

3. Dampak pada Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Pelaporan keuangan yang transparan terbukti berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik dan peningkatan kepercayaan publik. Studi menunjukkan bahwa transparansi berkorelasi dengan penurunan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik, karena pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yamen & Can, 2023; King & McKennie, 2023). Namun, pemahaman dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas transparansi (Nunes et al., 2023).

4. Studi Bibliometrik

Analisis bibliometrik membantu memetakan perkembangan penelitian pelaporan keuangan sektor publik. Studi oleh Montañez et al. (2023) mengidentifikasi tema utama seperti audit, etika keuangan, dan tata kelola. Hasil ini memberikan wawasan tentang tren penelitian, kesenjangan literatur, dan arah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

## C. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik sebagai pilar utama tata kelola yang baik dan kepercayaan publik. Analisis menunjukkan bahwa fokus penelitian telah berkembang dari pelaporan dasar menuju isu-isu yang lebih kompleks, seperti tata kelola, etika, dan upaya memerangi korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi peluang untuk studi lebih lanjut, terutama di bidang audit internal dan peran perbankan dalam meningkatkan transparansi keuangan sektor publik. Dengan memanfaatkan kolaborasi akademik yang dinamis, penelitian masa depan diharapkan dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan publik.

## ARTIKEL 3

### A. IDENTITAS ARTIKEL

1. Judul Artikel : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sorong.
2. Nama Penulis : Jordan Tiblola
3. Tahun Terbit Artikel : 2021
4. Tanggal Di Akses : 24 November 2025

### B. DESKRIPSI ARTIKEL

Akuntansi pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai penyempurnaan dari PP Nomor 24 Tahun 2005, menjadi landasan utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) maupun daerah (LKPD). SAP berfungsi untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor laporan keuangan, serta mendukung prinsip good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya, laporan keuangan pemerintah mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun berdasarkan Peraturan SAP untuk memastikan keseragaman dan kelayakan informasi keuangan.

Pada tingkat daerah, sistem akuntansi pemerintah semakin penting di era desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola keuangan sesuai potensi lokal. Proses APBD, yang dimulai dari penyusunan RAPBD hingga pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan pejabat internal, untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal. Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kinerja

keuangan daerah, di mana rasio efektivitas pajak yang mencapai 154,54% menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun rata-rata capaian anggaran PAD selama 2015–2018 hanya sebesar 16,88%. Pertumbuhan PAD yang rata-rata mencapai 88,7% menunjukkan tren positif, meskipun pada 2018 terjadi penurunan yang memerlukan perhatian khusus. Dari sisi belanja, kinerja keuangan juga cukup baik dengan rata-rata varians 88,30% dan pertumbuhan belanja sebesar 69,8%.

Keberhasilan implementasi SAP dan pengelolaan PAD tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia yang memahami prinsip akuntansi pemerintah dan mampu menerapkan standar tersebut secara efektif. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengelolaan pajak yang tertib, administrasi yang efisien, dan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai potensi objektif. Selain itu, pengawasan dan pengendalian pemungutan PAD secara sistematis dan berkelanjutan oleh aparatur menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan pemerintah dapat mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

Akuntansi pemerintah melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memainkan peran strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP, menjadi instrumen penting untuk menciptakan good governance. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong menunjukkan tren yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 88,7% meskipun realisasinya masih di bawah target, yakni rata-rata capaian hanya 16,88%. Di sisi belanja, kinerja juga tergolong baik dengan rata-rata varians 88,30% dan pertumbuhan positif sebesar 69,8%. Untuk meningkatkan kinerja ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, serta pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan

pendekatan ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan

## ANALISIS JURNAL NASIONAL

---

### JURNAL NASIONAL

#### A. IDENTITAS JURNAL

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Judul Artikel        | : Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kinerja Sektor Publik dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi |
| 2. Nama Penulis         | : Ani Primastiwi, Dewi Kusuma W & Hesti Mei Kitna   |
| 3. Tahun Terbit Artikel | : 2020  |
| 4. Volume/No/Halaman    | : 5/2/24-35   |
| 5. Nama Jurnal          | : Jurnal Akuntansi dan Ekonomi  |

#### B. ISI JURNAL

Dalam jurnal ini banyak membahas tentang perkembangan sistem akuntansi sektor publik yang dipengaruhi perkembangan zaman yang ada. Perkembangan akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam waktu singkat, di mana masyarakat memperhatikan kinerja manajerial aparatur pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga hal ini telah menjadi fokus perhatian masyarakat saat ini. Masyarakat mulai memperhatikan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Untuk itu aparatur pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memiliki profesionalisme yang tinggi, produktif dan transparan. Dengan demikian, semua pegawai termasuk pimpinan yang ada pada lembaga pemerintahan harus memiliki kinerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam jurnal ini kita bisa mengetahui bahwa budaya organisasi di era sekarang dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja sektor publik. Budaya organisasi menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran akan 7 mempengaruhi kinerja sektor publik, dimana semakin tinggi budaya organisasi akan semakin aktif berpartisipasi dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah, sehingga manajer tingkat bawah akan melaksanakan anggaran

yang lebih baik. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja sektor publik, sehingga budaya organisasi dapat memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja sektor publik. Kemudian dari hasil pengujian didalam jurnal ini membuktikan bahwa kinerja sektor publik dapat tercapai dengan adanya partisipasi anggaran dari pejabat struktural di SKPD. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis jawaban responden atas pernyataan keikutsertaan menyusun anggaran menjadi tanggung jawab dalam kinerja yang mana mayoritas jawaban responden menjawab setuju, hal tersebut diartikan bahwa pejabat struktural di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Gunungkidul mengakui bahwa partisipasi anggaran dapat meningkatkan kinerja. Adanya partisipasi dalam menyusun anggaran, maka pegawai merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran, sehingga diharapkan bawahan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan dari bahwa pada era saat ini, kinerja dari organisasi sektor publik menjadi fokus utama perhatian masyarakat, hal ini terjadi karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga wawasan masyarakat semakin luas. Untuk itu, perlu menjadi perhatian para pengelola organisasi sektor publik agar bisa memenuhi ekspektasi Masyarakat.

### **C. DAFTAR PUSTAKA**

- Kitna, H. M., Primastiwi, A., & Wardani, D. K. 2020. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kinerja Sektor Publik dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 5 (2), 24-35. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14028>.

## JURNAL NASIONAL 2

### A. IDENTITAS JURNAL

1. Judul Artikel : Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa
2. Nama Penulis : Erika Rahma Setiyani & Rizky Nurfadila
3. Tahun Terbit Artikel : 2021
4. Volume/No/Halaman : 1/2/72-82
5. Nama Jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita

### B. ISI JURNAL

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi akuntansi sektor publik di dalam sistem keuangan pemerintahan desa yang dimana penelitian ini mengambil salah satu desa yaitu Desa Gendingan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, Di desa Gendingan, transaksi telah dijurnal, dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Dengan demikian, bukan hanya memakai kwitansi dan catatan dalam menilai kas masuk dan di desa, bendahara juga wajib membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan APBD di Desa Gendingan tahun 2021 sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penerapan akuntansi sektor publik yang telah dilakukan oleh bendahara desa gendingan sudah memenuhi kriteria dan dalam laporan pertanggungjawaban dana desa ini menunjukkan adanya pengelolaan dana APBD secara teratur. Sistem pengelolaan secara tepat dapat menjadikan desa mandiri, dan akhirnya mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### C. DAFTAR PUSTAKA

Setiyani, E. R., & Nurfadila, R. 2021. Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1(2), 72-82. 9 <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/481>.

## JURNAL NASIONAL 3

### A. IDENTITAS JURNAL

Judul Artikel	: Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance Di Indonesia
Nama Penulis	: Jaminta Sinaga
Tahun Terbit Artikel	: 2017
Volume/No/Halaman	: 3/2/164-17
Nama Jurnal	: Jurnal Ilmiah Methonomi

### B. ISI JURNAL

#### 1. Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan di organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sendiri didefinisikan sebagai entitas yang sumber daya keuangannya berasal dari publik, dengan tujuan utama melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan. Dengan kata lain, akuntansi ini membantu pemerintah dalam perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan keuangan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

#### 2. Reformasi Tata Kelola Menuju *Good Governance*

Dalam konteks Indonesia, munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi tonggak reformasi tata kelola pemerintahan. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem desentralisasi yang transparan, akuntabel, dan efisien, yang dikenal sebagai *good governance*. Ciri-ciri tata kelola yang baik meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- c. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

#### 3. Peran Akuntansi Manajemen dalam *Good Governance*

Akuntansi manajemen sektor publik memainkan peran penting dalam menunjang *good governance* dengan menyediakan:

- a. Informasi Keuangan: Digunakan untuk merencanakan anggaran, memonitor kinerja, dan mengukur hasil kegiatan.

- b. Perencanaan Strategis: Membantu menentukan prioritas program dan penggunaan sumber daya secara optimal.
- c. Penilaian Kinerja: Menggunakan alat seperti Balanced Scorecard untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program.
- d. Pengelolaan Biaya: Mengadopsi metode seperti activity-based costing untuk mengidentifikasi biaya secara lebih rinci.

#### 4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua bentuk:

- a. Akuntabilitas Vertikal: Pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat kepada DPR.
- b. Akuntabilitas Horizontal: Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, yang dianggap lebih kritis karena menyangkut kepentingan publik secara langsung.

#### 5. Tantangan dan Hambatan

Ada tantangan dalam implementasi akuntansi manajemen sektor publik, antara lain:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor publik.
- b. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Kurangnya transparansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Meskipun demikian, reformasi terus dilakukan, seperti peningkatan independensi lembaga pemeriksa keuangan dan penerapan sistem informasi akuntansi modern.

### C. DAFTAR PUSTAKA

Sinaga, J. (2017). Peranan akuntansi manajemen sektor publik menuju good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 164-178

## ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL

---

### JURNAL INTERNASIONAL 1

Sumber : <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/780/417>

Penulis : Syarifah hatijaha , Indrawati Yuhertiana

Tahun : 2020

Judul : *Implementation of Government Accounting Standards During Pandemic and Internal Auditor Support in Preventing Fraud*

Membahas tentang penyelenggaraan akuntansi pemerintahan pada masa pandemi di Indonesia dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Seluruh aparat pengawas intern pemerintah baik di pusat maupun daerah dituntut untuk terus menjaga terselenggaranya penanganan Covid-19 dan terus berkolaborasi, berinovasi, serta saling membantu untuk mewujudkan akuntabilitas penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah harus terus bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor intern, serta seluruh pejabat pengawas intern di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penanganan pandemi covid-19 memerlukan kecepatan namun sekaligus ditegaskan bahwa kecepatan tidak boleh mengabaikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Tulisan ini juga memaparkan tentang reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya berbasis kas harus berubah menjadi berbasis akrual. Dalam implementasinya muncul beberapa kendala, mulai dari perubahan pola pikir pelaku sektor publik, keterbatasan sumber daya manusia hingga kemauan politik masing-masing kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu melalui telaah berbagai studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Data dapat

diperoleh dari buku atau literatur seperti artikel, media daring, hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul artikel. Implikasi dari penelitian ini adalah implementasi akuntansi pemerintahan di masa pandemi harus tetap memenuhi akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai standar yang berlaku. Komite Standar Akuntansi Pemerintah telah menerbitkan pedoman penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang relevan terkait dengan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

## JURNAL INTERNASIONAL 2

Sumber : <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.9308>  
Penulis : Ludfa Febriana, Siti Maria Wardayati, Whedy Prasetyo  
Tahun : 2017  
Judul : *The Effect of Internal Control Factors on the Accountability of the Auditor at the Inspektorat of Jombang District*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memperjelas peran pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor pengendalian intern terhadap akuntabilitas auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Jombang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Jombang yang berjumlah 35 auditor. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode sensus dengan unit analisis sebanyak 35 auditor di Inspektorat Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik multivariat dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko manajemen, pengendalian aktivitas, komunikasi dan informasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap akuntabilitas auditor di Inspektorat Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebaiknya auditor pada Inspektorat Kabupaten Jombang memperhatikan dan

menjaga kepatuhan pengendalian intern karena dengan demikian akuntabilitas auditor akan terjaga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan adalah kewajiban untuk melakukan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah. (Mardiasmo, 2009) menjelaskan akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal menunjukkan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

U R A I A N	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0	0,00
Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	186.606.053.935,00	196.397.607.931,00	0	185.508.598.949,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			0,00	
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>			0	
Dana Perimbangan			105,25	
Dana Insentif Daerah (DID)	186.606.053.935,00	196.397.607.931,00	105,25	185.508.598.949,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur				
Dana Keistimewaan				
Dana	0,00	0,00	0,00	0,00
Desa	0,00	0,00	0	0,00
Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiskal	0,00	0,00	0	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	0,00	0,00	0	0,00
Pendapatan Bagi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Bantuan			0,00	
Keuangan			0,00	
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>			0	
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>			0,00	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			0,00	
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAERAH BELANJA DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan	0	0	0	0
Jasa Belanja Bunga	0	0	0	0
Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0	0	0	0
Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.606.053.935,00	196.397.607.931,00	105,25	185.508.598.949,00

Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD  JUMLAH BELANJA OPERASI	35.000.000.000,00	33.091.799.328,00	94,55	35.573.051.022,00
	319.591.962.556,00	297.575.230.432,00	93,11	233.850.204.805,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	
			0,00	
			0,00	
	354.591.962.556,00	330.667.029.760,00	93,25	269.423.255.827,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.252.096.360,00	21.298.579.156,00	0	6.267.131.902,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	81,13	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Irigasi Belanja Modal Aset Tetap	0,00	0,00	0	0,00
Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	
	26.252.096.360,00	21.298.579.156,00	81,13	6.267.131.902,00

U R A I A N	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>				
Belanja Bagi Hasil	0,	0,	0,	0,
	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0
<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS /</b>				
	<b>380.844.058.916,00</b>	<b>351.965.608.916,00</b>	<b>92,42</b>	<b>275.690.387.729,00</b>
<b>(DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(194.238.004.981,00)</b>	<b>(155.568.000.985,00)</b>		<b>(90.181.788.780,00)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.269.658.988,00	113.269.658.988,00	100,00	138.269.658.988,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>			<b>0</b>	
			<b>0</b>	
<b>PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>113.269.658.988,00</b>	<b>113.269.658.988,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138.269.658.988,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,	0,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			<b>0</b>	
			<b>0,</b>	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH</b>			<b>0</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>113.269.658.988,00</b>	<b>113.269.658.988,00</b>		<b>138.269.658.988,00</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>(80.968.345.993,00)</b>	<b>(42.298.341.997,00)</b>		<b>48.087.870.208,00</b>

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022(AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal			131.520.901.676,00	138.269.658.988,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan			(131.520.901.676,00)	(138.269.658.988,00)
Subtotal			0,00	0,00
Pendapatan			196.397.607.931,00	185.508.598.949,00
Belanja			(351.965.608.916,00)	(275.690.387.729,00)
Surplus / (Defisit)			(155.568.000.985,00)	(90.181.788.780,00)
Penerimaan Pembiayaan			113.269.658.988,00	138.269.658.988,00
Pengeluaran Pembiayaan			0,00	0,00
Pembiayaan Netto			113.269.658.988,00	138.269.658.988,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			(42.298.341.997,00)	48.087.870.208,00
Subtotal			(42.298.341.997,00)	48.087.870.208,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir			(42.298.341.997,00)	48.087.870.208,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD			32.376.734.609,00	131.520.901.676,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi			(74.675.076.606,00)	(83.433.031.468,00)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	3	4	5=3-4	6=5:4
<u>PENDAPATAN</u>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>188.318.947.407,00</b>	<b>200.393.640.561,00</b>	(12.074.693.154,00)	(6,03%)
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0
LO Lain-lain PAD yang Sah-LO	188.318.947.407,00	200.393.640.561,00	(12.074.693.154,00)	0
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>144.567.500,00</b>	<b>0,00</b>	144.567.500,00	(6,03%)
Pendapatan Hibah-LO	144.567.500,00	0,00	144.567.500,00	0
LO Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				0
<u>BEBAN</u>				0
<b>BEBAN OPERASI</b>				0
Beban Pegawai				0
Beban Barang dan Jasa				0
Barang				0
Jasa				0
Beban Pemeliharaan				0
Beban Bunga				0
Beban				0
	<b>188.463.514.907,00</b>	<b>200.393.640.561,00</b>	<b>(11.930.125.654,00)</b>	<b>(5,95)</b>





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
<b>EKUITAS AWAL</b>		
<u>Ekuitas - LO</u>		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2022 dan 2021		
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	239.132.261.698,00	226.664.278.302,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	88.010.220.816,00	151.893.455.944,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2023	0,00	0,00
<u>RK PPKD</u>	327.142.482.514,00	378.557.734.246,00
RK PPKD per 31 Desember 2022 dan 2021		
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	88.010.220.816,00	151.893.455.944,00
RK PPKD per 1 Januari 2023	(88.010.220.816,00)	(151.893.455.944,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	0,00	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Awal</b>	<b>327.142.482.514,00</b>	<b>378.557.734.246,00</b>
<b>PERUBAHAN EKUITAS</b>		
Surplus/Defisit LO		
Mutasi RK PPKD	(162.928.763.555,00)	(133.813.363.969,00)
Koreksi Ekuitas	57.956.381.693,00	88.010.220.816,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	130.375.319,00	(5.612.108.579,00)
<b>Jumlah Perubahan Ekuitas</b>	<b>(104.842.006.543,00)</b>	<b>(51.415.251.732,00)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>		
Ekuitas - LO	164.344.094.278,00	239.132.261.698,00
RK PPKD	57.956.381.693,00	88.010.220.816,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>222.300.475.971,00</b>	<b>327.142.482.514,00</b>

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NERACA

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
<u>ASET</u>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>32.399.720.207,00</b>	<b>131.525.401.676,00</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas Dana BOP	32.399.720.207,00	131.525.401.676,00
Kas di BLUD	32.376.734.609,00	131.520.901.676,00
Kas BLUD	10.198.279,00	0,00
Kas Tunai	32.366.536.330,00	131.520.901.676,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Kas Transitoris BLUD	22.985.598,00	0,00
Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	2.895.000,00	0,00
PPh 21 di BLUD yang belum disetor	271.622,00	0,00
PPh 22 di BLUD yang belum disetor	9.480.476,00	0,00
PPh 23 di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
	10.338.500,00	0,00

PPh Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di BLUD yang belum disetor		
PPn-BM di BLUD yang belum disetor		

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	0,00	4.500.000,00
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Uang Titipan BLUD	0,00	0,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	0,00	0,00
Uang Muka Jasa BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>34.211.779.723,00</b>	<b>41.753.718.447,00</b>
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	561.002.338,00	267.586.317,00
Piutang Pendapatan BLUD	33.650.777.385,00	41.486.132.130,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	33.628.377.385,00	41.481.332.130,00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	33.560.210.385,00	41.396.285.130,00
Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien	0,00	0,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	68.167.000,00	85.047.000,00
Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Piutang Hibah BLUD	22.400.000,00	4.800.000,00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	0,00	0,00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Lainnya</b>	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	<b>(6.289.198.109,00)</b>	<b>(6.328.374.883,00)</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(6.289.198.109,00)</b>	<b>(6.328.374.883,00)</b>
Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Jasa Giro	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Bunga Deposito		

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00
Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Zakat	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD	(6.289.198.109,00)	(6.328.374.883,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(6.289.086.109,00)	(6.328.350.883,00)
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	(6.288.745.274,00)	(6.327.925.648,00)
Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	(340.835,00)	(425.235,00)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(112.000,00)	(24.000,00)
<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	<b>12.870.955.588,00</b>	<b>13.556.065.193,00</b>
<b>Persediaan</b>	12.870.955.588,00	13.556.065.193,00
Barang Pakai Habis	0,00	0,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>73.193.257.409,00</b>	<b>180.506.810.433,00</b>
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>ASET TETAP</b>	30.234.567.000,00	30.234.567.000,00
Tanah	403.260.416.645,00	383.334.989.213,00
Peralatan dan Mesin		

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Gedung dan Bangunan	249.642.083.038,00	249.642.083.038,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	416.340.320,00	416.340.320,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(524.718.865.850,00)	(493.648.275.658,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(362.995.492.172,00)	(341.554.205.753,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(161.606.833.848,00)	(151.998.347.091,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(116.539.830,00)	(95.722.814,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>158.834.541.153,00</b>	<b>169.979.703.913,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	0,00	0,00
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1.903.000.000,00</b>	<b>1.903.000.000,00</b>
Aset Tidak Berwujud	1.903.000.000,00	1.903.000.000,00
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>54.978.024.704,00</b>	<b>53.977.666.704,00</b>
Aset Rusak Berat/Usang	34.490.502.359,00	33.490.144.359,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari	0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental	0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan	0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	20.487.522.345,00	20.487.522.345,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(1.903.000.000,00)</b>	<b>(1.903.000.000,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>	<b>(53.133.856.204,00)</b>	<b>(52.133.498.204,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(32.647.543.859,00)	(31.647.185.859,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasilitasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(20.486.312.345,00)	(20.486.312.345,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1.844.168.500,00</b>	<b>1.844.168.500,00</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>	0,00	0,00
Properti Investasi - Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>233.871.967.062,00</b>	<b>352.330.682.846,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b><u>KEWAJIBAN</u></b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>22.985.598,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	0,00	0,00
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	12.647.098,00	0,00
Utang PPh Pusat	2.895.000,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	2.895.000,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	271.622,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 22	271.622,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	9.480.476,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		
Utang PPh 23		

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD	9.480.476,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 15	10.338.500,00	0,00
Utang PPN Pusat	10.338.500,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	10.338.500,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran	0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	0,00	0,00
	41.576.667,00	68.930.000,00

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD	41.576.667,00	68.930.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	41.576.667,00	68.930.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	4.500.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	41.576.667,00	64.430.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	0,00	0,00
<b>Utang Belanja</b>	<b>11.506.928.826,00</b>	<b>25.119.270.332,00</b>
Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	526.023.601,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	0,00	526.023.601,00
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD	11.506.928.826,00	24.593.246.731,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	2.503.789.051,00	2.840.164.819,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	9.003.139.775,00	21.736.201.912,00
Utang Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	16.880.000,00
Utang Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0,00	0,00
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang Jaminan</b>	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	<b>11.571.491.091,00</b>	<b>25.188.200.332,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank     (LKBB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang kepada Masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>11.571.491.091,00</b>	<b>25.188.200.332,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		
<b><u>EKUITAS</u></b>		
<b>EKUITAS</b>	<b>164.344.094.278,00</b>	<b>239.132.261.698,00</b>
<b>Ekuitas</b>		

U R A I A N	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>57.956.381.693,00</b>	<b>88.010.220.816,00</b>
RK PPKD Kas	56.423.833.918,00	83.433.031.468,00
RK PPKD Non Kas	1.532.547.775,00	4.577.189.348,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>222.300.475.971,00</b>	<b>327.142.482.514,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>222.300.475.971,00</b>	<b>327.142.482.514,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>233.871.967.062,00</b>	<b>352.330.682.846,00</b>

LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 AN 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	0,00	0,00
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Penerimaan	0,00	0,00
Pajak Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan	196.397.607.931,00	185.508.598.949,00
Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain	196.397.607.931,00	185.508.598.949,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Operasional BLUD	33.091.799.328,00	35.573.051.022,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	222.900.153.826,00	150.417.173.337,00
Arus Kas	222.900.153.826,00	150.417.173.337,00
Keluar	255.991.953.154,00	185.990.224.359,00
Pembayaran	(59.594.345.223,00)	(481.625.410,00)
Pegawai	0,00	0,00
Pembayaran	0,00	0,00
Barang	0,00	0,00
Pengeluaran Operasional BLUD	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari</b>	0,00	0,00
<b>Aktivitas Operasi ARUS KAS</b>	0,00	0,00
<b>DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	0,00	0,00
Arus Kas	0,00	0,00
Masuk	0,00	0,00
Penjualan atas	0,00	0,00
Tanah	21.298.579.156,00	6.267.131.902,00
Penjualan atas Peralatan dan	0,00	0,00
Mesin Penjualan atas Gedung	0,00	0,00
dan Bangunan Penjualan atas	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
	0,00	0,00

Lainnya	21.298.579.156,00	6.267.131.902,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	(21.298.579.156,00)	(6.267.131.902,00)
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	0,00	0,00
Arus Kas	0,00	0,00
Keluar		
Perolehan		
Tanah		
Perolehan Peralatan dan		
Mesin Perolehan		
Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi		
dan Jaringan Perolehan		
Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah Pengeluaran		
Pembelian Investasi Non		
Permanen Pengeluaran		
Pembelian Investasi Non		
Permanen		
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		
<b>Arus Kas Bersih dari</b>		
<b>Aktivitas Investasi ARUS KAS</b>		
<b>DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di	0,00	0,00
Bendahara Awal Tahun)Piutang Kelebihan	0,00	0,00
Pembayaran Pajak Awal Tahun	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,00	0,00
Sektor Perbankan	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di	0,00	0,00
Bendahara Akhir Tahun)	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada	0,00	0,00
Pihak Ketiga (Akhir Tahun)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	0,00	0,00
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>		
<b>TRANSITORIS</b>	0,00	0,00
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		
Penerimaan Uang Jaminan	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non	359.800.263,00	337.123.427,00
Anggaran	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00
Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Penerimaan UMK	0,00	0,00
	23.686.324.293,00	13.457.795.477,00
BLUD Penerimaan	23.686.324.293,00	13.457.795.477,00
Deposit Pasien	0,00	0,00
Penerimaan Deposit Jasa	24.046.124.556,00	13.794.918.904,00
BLUDPenerimaan Uang	0,00	0,00
Titipan	0,00	0,00
Penerimaan Kas yang Dibatasi	0,00	0,00
PenggunaannyaPenerimaan	0,00	0,00
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00
(PFK) - Pajak Penerimaan Perhitungan	364.300.263,00	337.623.427,00
Fihak Ketiga (PFK) - Non Pajak	18.251.242.688,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Hasil Eksekusi atas	0,00	0,00
Jaminan Penyetoran Kas	23.663.338.695,00	13.457.795.477,00
BLUD ke BUD	23.663.338.695,00	13.457.795.477,00
Pengembalian Uang Muka		

Jasa BLUDPembayaran UMK BLUD Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah Pengakuan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Pengembalian Deposit Pasien Penyetoran Kas BLUD ke BUD Kelebihan Setoran Pajak BLUD Pengembalian Uang Titipan Pengembalian Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		
---	--	--

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Non Pajak	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	42.278.881.646,00	13.795.418.904,00
<b>Arus Kas Bersih dari</b>	(18.232.757.090,00)	(500.000,00)
<b>Aktivitas Transitoris KOREKSI</b>	0,00	0,00
<b>SALDO AWAL KAS BLUD</b>	(99.125.681.469,00)	(6.749.257.312,00)
<b>Kenaikan</b>	131.525.401.676,00	138.274.658.988,00
<b>(Penurunan) Kas</b>	32.399.720.207,00	131.525.401.676,00
<b>Saldo Awal Kas</b>		
<b>BLUD</b>		
<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD</b>		

Sumber:

<https://rsudbudhiasih.jakarta.go.id/ppid/assets/media/upload/LAPORAN%20KEUANGAN%20AUDITED%202023.pdf>